



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **BHIMANTARA WIDYAJALA**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **103574**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 21.300.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/144 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000
2. Tanah Seluas 314 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Bangunan Seluas 100.8 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
4. Bangunan Seluas 61 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 534 m2/545 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 10.000.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN****Rp. 418.200.000**

1. MOBIL, MAZDA MINIBUS/BIANTE Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 158.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS/RUSH Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 260.200.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA****Rp. 571.391.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. 5.421.553.786****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 1.909.182.040****F. HARTA LAINNYA****Rp. 1.086.250.000****Sub Total****Rp. 30.706.576.826****III. HUTANG****Rp. 475.295.481****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 30.231.281.345**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.